



Saturday, 18 June 2016

DPRD Kecewa Kota Ambon Gagal Raih WTP



Ambon - DPRD Kota Ambon sangat merasa kecewa, karena untuk tiga tahun terakhir ini Kota Ambon gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait laporan keuangan pemerintah.

“Saya merasa kecewa karena tahun ini kita hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), padahal Ambon ini adalah ibukota Provinsi Maluku, namun kenapa tidak bisa raih WTP sedangkan kabupaten lain bisa meraihnya,” ujar Maatita kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Jumat (17/6).

Menurutnya, bukan saja masalah keuangan yang masih amburadul namun yang menjadi kendala menyangkut dengan penyerahan aset yang sampai dengan saat ini tidak memiliki kejelasan dari pemprov.

“Untuk keuangan memang harus ada evaluasi dari kepala daerah dalam hal ini Walikota Ambon untuk bisa membenahi pengelolaan keuangan di pemkot. Selain itu, pemkot harus terus melakukan koordinasi dengan pemprov untuk penyerahan aset yang selama ini dijanjikan kepada pemkot,” jelasnya.

Dengan hanya meraih WDP, menurutnya, pemkot harus melakukan perombakan pengelolaan keuangan, tidak bisa seperti saat ini karena sudah terbukti selama tiga tahun ini pemkot selalu gagal.

Selain itu, kinerja dari masing-masing SKPD harus ditingkatkan karena sudah terbukti ketika melakukan evaluasi APBD, DPRD selalu menemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan.

“Hal-hal itu yang menjadi perhatian pemkot, sehingga dalam waktu dekat DPRD akan mengundang pemkot untuk membicarakan kendala apa sehingga pengelolaan keuangan masih amburadul,” katanya.

Realisasi Lemah

Opini WDP yang diperoleh Pemkot membuktikan laporan realisasi APBD pada SKPD-SKPD lemah.

“Proses audit BPK terhadap laporan keuangan itu bersifat menyeluruh dan bukan terhadap SKPD-SKPD tertentu saja sehingga semua SKPD yang dipimpin oleh walikota harus bertanggung jawab terhadap kinerja keuangannya tetapi sebaliknya jika tak mampu mengelola dan melaporkan realisasi anggarannya maka tentu akan mempengaruhi opini terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan saat diaudit oleh BPK,” ungkap Akademisi Fakultas Ekonomi Unpatti, Erly Leiwakabessy kepada *Siwalima*, di Ambon, Jumat (17/6).



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : SIWALIMA

Dijelaskan, audit BPK itu bukan saja berhubungan dengan faktor kas daerah misalnya atau hanya pada badan keuangan atau dinas pendapatan tetapi semua SKPD harus diaudit karena untuk mengeluarkan satu kesimpulan audit harus dilihat secara menyeluruh bukan saja materialnya tetapi juga menyangkut laporan realisasi APBD.

“APBD bukan saja menjadi tanggung jawab SKPD-SKPD tertentu tetapi kewenangan dan tanggung jawab dari pemkot yang dikomandani oleh Richard Louhenapessy sebagai walikota karena ini tanggung jawab untuk melihat hal ini secara keseluruhan,” jelasnya.

Ia mengatakan, ada empat kriteria yang digunakan BPK untuk mengaudit yakni kriteria kesesuaian, kepatutan dan efektivitas, jadi apakah semua standar atau point-point yang masuk dalam akuntansi pemerintah itu sudah diikuti oleh pemkot ambon ataukah belum.

“Kalau kita mau jujur, ada SKPD-SKPD tertentu yang secara parsial dilihat sudah bisa meraih opini WTP namun tidak bisa seperti itu karena opini WTP ini secara keseluruhan. Jadi efektivitas pelaksanaan APBD belum sesuai dengan yang diharapkan misalnya masih terjadi kebocoran anggaran dan sebagainya,” katanya.

Menurut Penjabat Dekan Fakultas Ekonomi ini, kedepan Pemkot Ambon harus melihat celah yang harus diperbaiki dan ditutupi supaya secara finansial bukan saja material dan realisasi anggaran tapi laporan untuk memperoleh WTP itu harus dilakukan dengan semua aspek finansialnya.

Sebagaimana diketahui, penyerahan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkot tahun anggaran 2015 dilakukan Kepala Sub Auditorial BPK RI Perwakilan Maluku, Rudianto Lumbantobing kepada Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan Ketua DPRD James Maatita, di kantor BPK Perwakilan Maluku, Kamis (16/4).

Sebelumnya sejak tahun 2010-2012, BPK tak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemkot atau dikenal dengan sebutan disclaimer. Selanjutnya tahun 2013-2015, pemkot tetap bertahan dengan opini WDP. (S-40)